



Informasi Strategis

Jumat, 26 Februari 2021

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14

BIDANG DALAM NEGERI

BPBD Pontianak Berupaya Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Pada tanggal 24 Februari 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak terus berupaya memadamkan api yang sempat menimbulkan kabut asap tipis. Sampai saat ini, terpantau 43 titik api muncul di sejumlah wilayah Kota Pontianak, seperti di Jalan Purnama 2, Perdana, Paris 2, serta Sepakat 2.

Kapolsek Pontianak Selatan AKP Galih Wicaksono yang turun langsung ke lapangan menyatakan api bersumber dari lahan di kawasan Sepakat 2 ujung.

LEVEL KERAWANAN NASIONAL



LEVEL KERAWANAN PROVINSI



LEVEL KERAWANAN KABUPATEN



Berdasarkan bukti-bukti yang ada, menurut Kapolsek Pontianak Selatan, lahan tersebut terindikasi disengaja dibakar oleh pihak tertentu untuk membuka lahan. Dugaan pidana ini akan menjadi titik awal penyidikan pihak kepolisian.

Menkopolkukam Mahfud MD melaporkan adanya 135 kejadian kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) sejak Januari 2021 hingga saat ini. Dari total 135 kasus Karhutla itu, Kalbar penyumbang kasus terbanyak. Beberapa kejadian Karhutla tersebut terjadi di berbagai daerah diantaranya, Aceh ada 3 kejadian, Sumatera Utara 9 kejadian, Riau 29 kejadian, Kepulauan Riau 4 kejadian, Jambi 2 kejadian, Sumatera Selatan 5 kejadian, Kalimantan Barat 52 kejadian, Kalimantan Tengah 12 kejadian, Sulawesi Tenggara 20 kejadian dan Papua ada 1 kejadian.

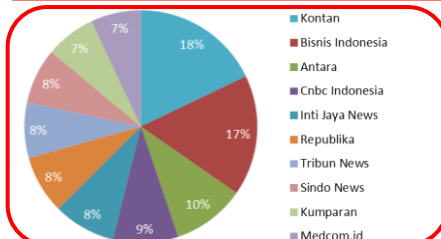
Presiden Joko Widodo menyebutkan konsekuensi kegagalan mengatasi Karhutla adalah pencopotan pejabat, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan pemerintah sejak 2016. Kesepakatan ini ditujukan kepada Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem dan Dandim. Khusus bagi para Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem dan Dandim yang baru, Jokowi mengingatkan supaya mereka memahami konsekuensi tersebut.

MEDIA EXPOSURE

531 Berita *Online* (Lokal/Nasional)

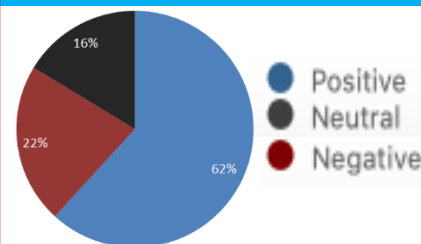
3.191uitan Twitter

471 *Posting* Facebook

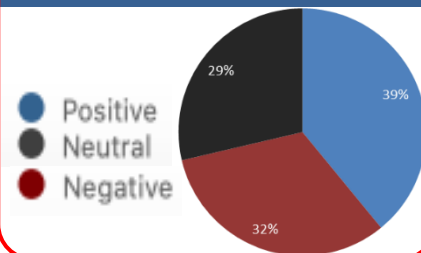


SENTIMENT PUBLIK

TWITTER



FACEBOOK



ANALISIS

DAMPAK

Karhutla baik disengaja ataupun tidak dapat mengakibatkan banyak bencana, antara lain kabut asap yang membahayakan sistem pernafasan, mengganggu lalu lintas, hancurnya ekosistem (bencana ekologi) dan pada gilirannya dapat menyebabkan bencana banjir.

SARAN

Kemhan mendukung Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup serta K/L terkait merumuskan kebijakan dan komitmen menjaga lingkungan hidup (ekosistem) di seluruh Indonesia.

BIDANG DALAM NEGERI

Oknum Polri Menembak 3 Orang Tewas di *Cafe* di Cengkareng, Kalideres, Jakarta Barat

1

FAKTA

Pada tanggal 25 Februari 2021, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, mengatakan sekitar pukul 05.10 WIB, bertempat di *Cafe* RM.Jl. Outer Ring Road, RT. 04/06, Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, telah terjadi insiden penembakan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kalideres terhadap 1 Orang anggota TNI dan 2 orang warga sipil. Pelaku Penembakan diketahui bernama Cornelius Siahaan pangkat Brigadir, Jabatan Buser Reskrim, Kesatuan Reskrim Polsek Kalideres. Korban meninggal dunia anggota TNI bernama Martinus Kardo Rizky Sinurat pangkat, Pratu Nrp 31130001640391, Jabatan Kawal Denma Kostrad, Kesatuan Denma Kostrad.

TINGKAT KERAWANAN PROVINSI

RENDAH

SEDANG

TINGGI

TINGKAT KERAWANAN NASIONAL

RENDAH

SEDANG

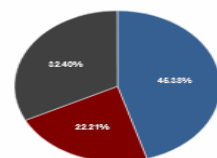
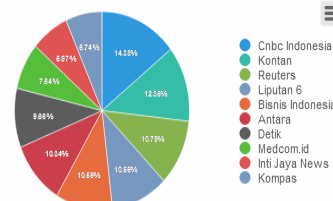
TINGGI

MEDIA EXPOSURE

2.296 Berita Online

2.093.416 Cuitan Twitter

54 Posting Facebook



2

ANALISIS

Insiden persitiwa penembakan yang terjadi di *Cafe* RM.Jl. Outer Ring Road, Cengkareng Timur Jakarta Barat yang menewaskan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka menjadi perhatian publik. Pelaku diketahui adalah oknum Polri aktif dan salah satu korban adalah anggota TNI aktif. Peristiwa terjadi berawal saat petugas *cafe* menyampaikan *Bill* tagihan pembayaran minuman kepada pelaku yang direspon oleh pelaku dengan cekcok mulut dan di tengahi oleh korban dari anggota TNI sehingga berujung penembakan. Peristiwa penembakan tersebut rentan terjadinya provokasi yang berimplikasi aksi balasan dari rekan korban TNI, yang memicu hubungan TNI-Polri kurang kondusif sehingga dapat memicu terjadinya gesekan prajurit TNI dengan Polri dilapangan.

3

SARAN

Aksi penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri menewaskan 3 orang dan 1 orang luka-luka sehingga berdampak negatif karena akan merusak citra institusi Polri dan sinergitas TNI-Polri.

Kemhan berkoordinasi dengan Mabes TNI dan Mabes Polri, mendukung langkah Kapolda Metro Jaya melakukan proses hukum dengan tegas terhadap oknum Polri pelaku penembakan guna penegakan hukum.

1

FAKTA/DATA

Pemberontak FDLR di Kongo Melakukan Serangan dan Menewaskan Dubes Italia

Kementerian Dalam Negeri, otoritas DRC menyatakan bahwa pemberontak dari gerakan Pasukan Demokrat untuk Pembebasan Rwanda (FDLR) dianggap bertanggung jawab atas tewasnya Luca Attanasio, Dubes Italia untuk Republik Demokratik Kongo (DRC) beserta pengawal dan pengemudinya. Pemberontak yang aktif di sekitar provinsi timur Kivu Utara melancarkan serangan saat rombongan dalam perjalanan kemanusiaan dalam konvoi MONUSCO Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Program Pangan Dunia (WFP) di wilayah Rutshuru, beberapa kilometer dari Goma, ibu kota provinsi tersebut.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2

ANALISA

Kementerian dalam negeri RDK menuduh penyerangan dan pembunuhan itu dilakukan Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR) yang merupakan kelompok pemberontak Hutu Rwanda yang melawan pemerintah Rwanda. Peristiwa ini mendapat kecaman dunia internasional, dimana sebelumnya Duta besar Prancis Philippe Bernard tewas dalam kerusuhan di Kinshasa pada Januari 1993. Serangan terhadap misi kemanusiaan dan penculikan pekerja kemanusiaan telah meningkat, tahun lalu tercatat 12 insiden di Kivu Utara dan Selatan. Mereka umumnya meminta tebusan. Namun insiden yang menewaskan petugas PBB di dekat Taman Nasional Virunga, menandakan lemahnya pengamanan terhadap pejabat penting PBB dari otoritas setempat. Diketahui Puluhan kelompok bersenjata beroperasi di wilayah Virunga, yang terletak di sepanjang perbatasan Kongo dengan Rwanda dan Uganda. Penjaga taman telah berulang kali diserang, termasuk delapan orang yang tewas dalam penyergapan bulan lalu. Kejaksaan Italia memastikan akan menyelidiki penyerangan itu dengan mengirimkan Tim Polisi Militer. Sekretaris Jenderal PBB meminta agar cepat menginvestigasi peristiwa itu dan membawa pelakunya ke pengadilan.

3

DAMPAK

Kekerasan sengaja dibangun dan dilestarikan untuk menimbulkan rasa takut, permusuhan dan saling curiga sehingga situasi menjadi tidak stabil. Lemahnya keamanan negara mendorong kelompok untuk saling berkompetisi dalam mengontrol negara untuk memperoleh keuntungan dari akses terhadap sumber daya alam maupun melalui perdagangan senjata.

Upaya Indonesia Dalam Memediasi Situasi di Myanmar diprotes Masa Anti-Kudeta Myanmar

1

FAKTA

KBRI Yangin didatangi ratusan pengunjung rasa yang berkumpul sejak tanggal 23 Februari 2021 untuk meminta Indonesia tidak mendukung junta militer dan menghentikan negosiasi dengan militer Myanmar. Hal ini disebabkan pertemuan Menlu Indonesia Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar U Wunna Maung Lwin yang disaksikan Menlu Thailand, Don Pramudwinai dalam membahas persoalan terkait kudeta Myanmar.



2

ANALISIS

Pemerintah Indonesia melalui Kemlu, telah memimpin upaya mengarahkan jalan keluar dari krisis dengan bantuan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia dhi. Menlu telah melakukan misi *Shuttle diplomacy* selama dua minggu terakhir Indonesia mendorong ASEAN menyamakan persepsi terkait situasi di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mencoba menengahi keinginan junta militer dan masyarakat Myanmar. Namun hal ini mendapatkan respon penolakan dari masa Anti-Kudeta karena Indonesia dianggap tidak tegas terhadap junta dengan membuka negosiasi dengan Militer (yang bukan pemerintah sah). Demonstran menolak adanya pemilu baru dan tetap menuntut pemerintah terpilih.



INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA

IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Upaya Indonesia juga disorot oleh media asing seperti Reuters yang seakan-akan menyebutkan Indonesia mendukung militer untuk mengadakan pemilu ulang pada tahun 2022. Namun, Hal ini telah disanggah juru bicara Kemlu, bahwa Menlu RI menghimpun pemahaman yang sama diantara negara ASEAN, dan membuka dialog dengan Pemerintah Myanmar terkait keinginan junta militer tersebut.

4

SARAN

Kemhan perlu mendukung Kemlu untuk mewedahi keinginan dua pihak (masyarakat dan junta militer) dengan mengirimkan pengawas independen dari ASEAN untuk mengawasi pemilu ulang yang diajukan junta militer pada tahun 2020. Hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk tidak berkembang persepsi yang salah terkait usulan tersebut.

INFO GLOBAL**UNI EROPA DESAK CHINA JAMIN AKSES PBB KE PROVINSI
XINJIANG****1****FAKTA**

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, mengatakan kepada PBB bahwa Beijing harus membantu penyelidikan laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga minoritas Uighur. Komentar Borrell dikemukakan menyusul keputusan parlemen Kanada yang menyatakan bahwa perlakuan Cina terhadap populasi minoritas Uighur sebagai tindakan genosida. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, ingin mengirim tim ke Xinjiang, di barat laut China, untuk menyelidiki laporan tersebut.

2**ANALISIS**

Uni Eropa mendapat kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia karena kesepakatan investasi tentatif dengan China yang menurut para kritikus menutup mata terhadap penderitaan orang-orang Uighur. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menuduh Beijing melakukan genosida terhadap minoritas Uighur.

PBB memperkirakan lebih dari satu juta muslim China, mayoritasnya adalah minoritas Uighur, telah ditahan di kamp-kamp interniran di Xinjiang. kelompok-kelompok HAM meyakini bahwa China telah menahan hingga satu juta warga Uighur dan menggunakan mereka sebagai tenaga kerja paksa selama beberapa tahun terakhir di tempat yang didefinisikan negara sebagai "*kamp pendidikan ulang*.". Mereka juga mengatakan Beijing telah menggunakan sistem pengawasan massal, penahanan, indoktrinasi, dan bahkan sterilisasi paksa.

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 Universal Declaration of Human Right yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

3**DAMPAK**

Kelompok hak asasi mengatakan, polisi, jaksa dan pengadilan telah ditempatkan di bawah tekanan untuk memberikan hukuman yang cepat dan keras atas nama kontraterorisme, yang menyebabkan banyak orang dipenjara tanpa melakukan pelanggaran apapun. Mereka juga mengatakan Beijing telah menggunakan sistem pengawasan massal, penahanan, indoktrinasi, dan bahkan sterilisasi paksa. Sementara menurut Human Rights Watch, lebih dari 250.000 orang telah secara resmi dijatuhi hukuman dan dipenjara sejak 2016. Banyak dari mereka di penjara Xinjiang adalah orang biasa yang dihukum karena menjalani hidup mereka dan menjalankan agama mereka .

4**SARAN**

Kemenhan mendorong kemenlu untuk memberikan dukungan kepada PBB untuk menyelidiki pelanggaran HAM terhadap komunitas Uighur di China, serta melindungi hak-hak warga minoritas Uighur.

